

**JURNAL**

**DAMPAK PENERBITAN PERATURAN WALIKOTA  
YOGYAKARTA NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN  
PEMBANGUNAN HOTEL TERHADAP PERMOHONAN IZIN  
PEMBANGUNAN HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA**



**Diajukanoleh :**

**BERLIAN**

**NPM : 110510687**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan  
Pemerintahan**

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JURNAL**

**DAMPAK PENERBITAN PERATURAN WALIKOTA  
YOGYAKARTA NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN  
PEMBANGUNAN HOTEL TERHADAP PERMOHONAN IZIN  
PEMBANGUNAN HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA**




**Diajukan oleh :**

**BERLIAN**

**NPM : 110510687**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing**

  
**Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum**

- I. **Judul Tugas Akhir** : Dampak Penerbitan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel Terhadap Permohonan Izin Pembangunan Hotel Di Kota Yogyakarta

II. **Identitas**

Nama Mahasiswa : Berlian  
Nama Dosen Pembimbing : Y. Sri Pudyatmoko

- III. **Nama Program Studi** : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. **Abstract**

Dampak Penerbitan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel Terhadap Permohonan Izin Pembangunan Hotel Di Kota Yogyakarta

*Together with the increasing of tourist who visit in Yogyakarta, the amount of the hotel constructions are increasing too. It is very common to find a hotel in every side of this city. This leads a problem. The hotel construction become uncontrolled in this city. In this situation, the Yogyakarta District Government make a moratorium regulation about a hotel construction with Peraturan walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.*

*This thesis will discuss about the impact of Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 to hotel constructions.*

*This legal research use a normative method with the qualitative data analisis, and then the data from the sources. It is to connect the data from any different source and analyze them. Related to the research, there are 104 IMB application about the hotel construction that propose to Dinas Perizinan Yogyakarta since November, 20 2013 until December, 31 2013. From the 104 IMB application, there are 76 IMB application were accepted by the goverment.*

*The moratorium regulation about the hotel constructions doesn't control the hotel constructions. In the future, Yogyakarta District Government should make a regulation that can be implementable to the purpose.*

*Keywords: IMB of hotel constructions, control, mayor regulation*

## **V. Pendahuluan**

Latar Belakang : Di dalam bagian penjelasan umum dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung diuraikan tentang tujuan dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan, kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah, dalam suatu masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dewasa ini merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kemajuan pembangunan yang pesat. Yogyakarta dikenal sebagai kota pariwisata dan kota pelajar dengan unsur budaya yang melekat, dan memiliki magnet yang cukup kuat untuk menarik para wisatawan dari penjuru daerah tanah air maupun mancanegara. Kunjungan wisata ke Yogyakarta semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik dari wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Hal itu pula yang mendorong jumlah kebutuhan hotel sebagai sarana peristirahatan dan penginapan turut meningkat, seiring jumlah wisatawan yang makin bertambah. Saat ini dalam lingkaran daerah wisata khususnya di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, lazim ditemui hotel dari berbagai macam kelas, mulai dari kelas losmen, motel, melati hingga hotel berbintang, sehingga berbagai investor saling bersaing untuk mendirikan hotel di berbagai tempat demi melayani wisatawan dan mendapat keuntungan.

Persaingan dari para investor untuk mendirikan bangunan hotel di beberapa lokasi strategis di Yogyakarta dari tahun ke tahun terus meningkat secara signifikan. Pendirian bangunan hotel tersebut tidak serta merta berdiri begitu saja di sebuah lahan, namun dibutuhkan prosedur perizinan agar sebuah hotel dapat dibangun. Dalam pengertian umum berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perizinan diartikan sebagai hal pemberian izin. Izin itu sendiri dalam KBBI diartikan sebagai pernyataan mengabulkan (tidak melarang), atau persetujuan membolehkan. Dengan demikian, secara umum perizinan dapat diartikan sebagai hal pemberian pernyataan mengabulkan, atau persetujuan membolehkan.<sup>1</sup> Menurut Spelt dan ten Berge<sup>2</sup>, ada beberapa tujuan pemberian izin, yakni:

1. Suatu keinginan untuk mengarahkan atau mengendalikan pada aktivitas-aktivitas tertentu.
2. Untuk mencegah bahaya bagi lingkungan.
3. Adanya keinginan melindungi dari obyek-obyek tertentu.
4. Untuk membagi benda-benda yang sedikit.
5. Untuk mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas yang harus memenuhi syarat tertentu.

Di tengah optimisme pembangunan dan persaingan bisnis, pembangunan hotel sebagai sarana peristirahatan pun kian sukar untuk dikendalikan. Hotel-hotel dibangun tanpa memperhatikan bahwa lahan yang dipergunakan untuk membangun semakin terbatas. Hal ini dipandang penting, sehingga perlu sebuah peraturan untuk mengatur, sehingga terbit Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Sepdikbud, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.447.

<sup>2</sup> Mr. N.M Spelt dan ten Berge dan Prof. Mr.J.B.J.M ten Berge, disunting oleh Dr. Philipus Hadjon, S.H., 1993, *loc.cit.* hlm. 4, dalam Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, hlm. 11.

2013 ini muncul setelah menimbang bahwa luas wilayah Kota Yogyakarta terbatas, dan dalam rangka menjaga kualitas pelayanan pariwisata, maka perlu pengendalian pembangunan jumlah hotel. Dengan dikeluarkannya peraturan walikota tersebut maka diharapkan jumlah permohonan izin pembangunan hotel pun semakin terkendali pula. Peraturan Walikota Yogyakarta tersebut tentu mengacu pada Undang-undang Dasar 1945, dimana Undang-undang Dasar 1945 merupakan peraturan tertinggi dan peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan. Seperti yang tertuang dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang berisi, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 khususnya dalam Pasal 4 ayat (1) yang berisi, “Permohonan IMB bangunan hotel yang telah terdaftar pada Dinas Perizinan sebelum 1 Januari 2014, maka perizinannya tetap diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Hal ini menimbulkan permasalahan pada beberapa pihak. Di satu sisi Peraturan Walikota Yogyakarta tersebut diharapkan mampu untuk mengendalikan jumlah pembangunan hotel serta jumlah permohonan izin hotel yang masuk, tetapi di sisi lain berdasar Pasal 4 ayat (1) tersebut menyebabkan para investor memasukkan izin pendirian hotel ke Dinas Perizinan sebelum tahun 2014, yakni sebelum moratorium pembangunan hotel diberlakukan. Hal itu pula yang kemudian menyebabkan para investor kurang cermat dalam menentukan lokasi yang hendak dipilih untuk mendirikan hotel, pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pembangunan hotel tidak diperhatikan, karena mengejar izin yang akan diajukan. Kurangnya infrastruktur pendukung, kelak akan

menjadi kendala pula, selain itu kurang meratanya pembangunan hotel akan menjadi bumerang sendiri bagi Kota Yogyakarta.

Secara umum sepanjang tahun 2010 hingga 2012 terdapat banyak hotel yang dibangun di Yogyakarta. Hotel yang dibangun pun beragam, mulai dari berukuran sedang hingga berkapasitas besar. Hotel-hotel baru itu pada umumnya didirikan di kawasan strategis pariwisata Yogyakarta. Tercatat hingga tahun 2013 terdapat 37 hotel berbintang dan 370 non bintang, serta beberapa hotel yang masih dalam tahap pembangunan.<sup>3</sup> Menurut Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, hingga batas akhir pengajuan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) hotel pada 31 Desember 2013, telah diterima pengajuan permohonan berjumlah 106 buah permohonan. Dari pendaftaran yang diterima, Dinas Perizinan telah menerbitkan 11 IMB baru yang diantaranya berlokasi di Kecamatan Wirobrajan, Pakualaman, Gondomanan, Jetis, Danurejan dan Gedongtengen.<sup>4</sup> Pengajuan permohonan izin pembangunan hotel tersebut pada umumnya masih terpusat di ring I lokasi pusat wisata Yogyakarta Malioboro. Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Yogyakarta Deddy Pranowo Eryono secara terpisah mempertanyakan komitmen pemerintah Kota Yogyakarta, mengingat sebelum terbitnya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel, ada kesepakatan bahwa perizinan pendirian hotel baru di ring I di Malioboro dan sekitarnya dihentikan.<sup>5</sup>

Penerbitan Peraturan Walikota Yogyakarta menimbulkan permasalahan dan dilema, karena pada awalnya Peraturan Walikota Yogyakarta tersebut ditujukan untuk mengendalikan jumlah pembangunan hotel di Yogyakarta dan jumlah permohonan izin pembangunan hotel yang masuk, serta untuk menjaga kualitas pelayanan

---

<sup>3</sup> [www.atmajayanews.wordpress.com](http://www.atmajayanews.wordpress.com), Haryorachmanto Wijowarastro, *Yogyakarta Berhati Nyaman?*, diunduh pada tanggal 29 Agustus 2014

<sup>4</sup> [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), Bilal Ramadhan, *Pemkot Yogyakarta Masih "Bandel" Soal Izin Pendirian Hotel*, diunduh pada tanggal 29 Agustus 2014

<sup>5</sup> *Ibid.*

pariwisata justru menyebabkan banyak investor yang mengajukan izin pembangunan hotel sebelum moratorium diberlakukan. Dengan demikian permohonan izin pembangunan hotel pun sukar untuk dikendalikan, hal itu pula yang akan menyebabkan jumlah pembangunan hotel tidak bisa terkontrol, terlebih apabila seluruh syarat perizinan hotel telah terpenuhi, maka Dinas Perizinan pun akan mengeluarkan izin sesuai dengan prosedur.

**Rumusan Masalah :**

1. Bagaimanakah maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel?
2. Bagaimanakah dampak penerbitan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel terhadap permohonan izin pembangunan hotel di Kota Yogyakarta?

**VI. Isi Makalah**

**A. Tinjauan Umum IMB Bangunan Hotel**

**1. Tinjauan terhadap Perizinan**

**a. Pengertian Perizinan**

Secara yuridis pengertian perizinan tertuang dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pasal 1 angka 9 menegaskan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

**b. Tujuan Perizinan**

Tujuan sistem perizinan menurut Spelt dan ten Berge beberapa diantaranya yakni<sup>6</sup>:

- 1) Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu;
- 2) Mencegah bahaya bagi lingkungan;
- 3) Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu.

---

<sup>6</sup> Spelt dan Ten Berge dalam Y. Sri Pudyatmoko, *op.cit*, hlm.11



### **c. Urgensi Izin**

Beberapa urgensi dari izin<sup>7</sup>:

- 1) Sebagai landasan hukum (*legal base*);
- 2) Sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum;
- 3) Sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan; dan
- 4) Sebagai alat bukti dalam hal ada klaim.

## **2. IMB Bangunan Hotel**

### **a. Dasar Hukum IMB Bangunan Hotel yakni:**

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
- 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung
- 6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029
- 7) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel

### **b. Persyaratan IMB Bangunan Hotel**

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan IMB Bangunan Hotel di Kota Yogyakarta yakni<sup>8</sup>:

- 1) Fotokopi sertifikat tanah atau surat bukti kepemilikan lain yang sah.  
Untuk tanah milik pemerintah/ Negara dan hak guna bangunan (HGB), apabila masa berlakunya kurang dari 1 (satu) tahun maka harus diperpanjang dahulu.

---

<sup>7</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *op.cit*, hlm. 24

<sup>8</sup> [www.perizinan.jogjakota.go.id](http://www.perizinan.jogjakota.go.id), *Jenis Izin dan Syarat*, diunduh pada tanggal 24 Februari 2015.

- 2) Untuk tanah milik Kraton, magersari dan jagang, harus ada persetujuan dari penghageng wahono sarto kriyo (disertai gambar-gambar situasi yang dikeluarkan oleh Kraton).
- 3) Untuk pemilik hak atas tanah yang telah meninggal dan belum ada peralihan hak, maka harus ada surat keterangan waris dan kerelaan/persetujuan ahli waris yang diketahui oleh RT, RW, Lurah dan Camat setempat.
- 4) Untuk tanah yang bukan milik pemohon izin harus ada kerelaan dari pemilik tanah disertai dengan materai yang cukup.
- 5) Fotokopi KTP pemohon.
- 6) Advice planning/keterangan rencana.
- 7) Gambar situasi bangunan (letak bangunan, akses jalan, taman dalam persil yang digunakan untuk sumur peresapan air hujan (SPAH)).
- 8) Denah tampak depan, samping, rencana pondasi, atap, gambar potongan, gambar instalasi, dan sanitasi, disertai dengan tanda tangan penanggung jawab pada masing-masing gambar.
- 9) Perhitungan struktur meliputi perhitungan plat, balok, kolom, tangga, pondasi, rangka dan atap.
- 10) Hasil penyelidikan tanah (tes tanah).

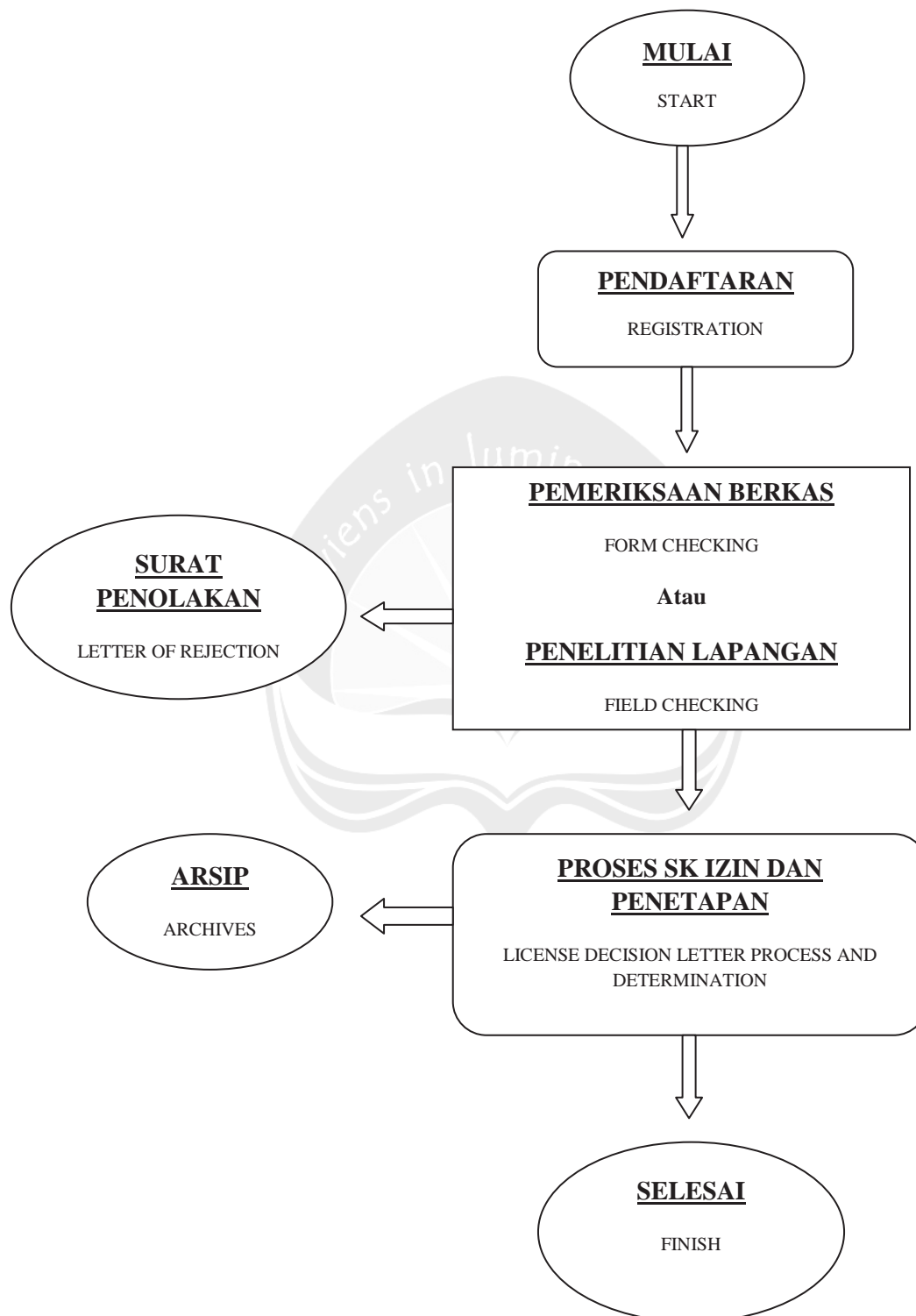
Syarat-syarat di atas merupakan syarat umum yang harus dipenuhi untuk mendirikan suatu bangunan, namun untuk pembangunan hotel tentu saja harus memenuhi persyaratan lain kaitannya dengan lingkungan. Untuk pembangunan hotel harus melampirkan dokumen lingkungan yang berupa AMDAL, UKL-UPL dan dokumen lingkungan lain yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

**c. Mekanisme Permohonan IMB Bangunan Hotel di Kota Yogyakarta:**  
**Berikut bagan dari mekanisme pengajuan permohonan IMB bangunan hotel<sup>9</sup>:**

---

<sup>9</sup> [www.perizinan.jogjakota.go.id](http://www.perizinan.jogjakota.go.id), *Prosedur Pelayanan Perizinan*, diunduh pada tanggal 24 Februari 2015

**Bagan I: Prosedur Pelayanan Izin ( *License Service Procedure* )**



Sumber: Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2015

**d. Urgensi IMB Bangunan Hotel, di antaranya yakni:**

- 1) Dapat dilakukan analisis terhadap keamanan desain, lokasi, dan dampak lingkungan terkait dengan bangunan hotel yang akan dibangun.<sup>10</sup>
- 2) Digunakan dalam rangka mengatur bangunan sehingga bahan yang digunakan sesuai dengan standar, pendiriannya diupayakan tidak mengganggu lingkungan sekitar, misalnya tidak mengganggu lalu lintas, tidak merusak benda cagar budaya, konstruksi bangunannya memenuhi standar keselamatan.<sup>11</sup>

**e. Tinjauan terhadap Hotel**

Pengertian hotel menurut Surat Keputusan Menteri Pariwisata Pos Telekomunikasi No. KM37/PW340/MPPT-86 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Hotel, Bab I Pasal 1 sub b adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan, dan minuman, serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial.

**B. Maksud dan tujuan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta**

Adapun maksud dan tujuan dari Peraturan walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang pengendalian Pembangunan hotel yakni:

1. Untuk mengendalikan pembangunan hotel di Kota Yogyakarta, mengingat luas wilayah Kota Yogyakarta yang relatif sempit.
2. Melindungi usaha-usaha perhotelan yang telah ada di Kota Yogyakarta, sehingga usaha-usaha perhotelan yang telah ada di Kota Yogyakarta dapat bersaing atau berkompetisi secara sehat.
3. Sebagai bahan kajian untuk menetapkan jumlah kebutuhan hotel di Kota Yogyakarta.

---

<sup>10</sup> [www.rumahku.com](http://www.rumahku.com), *Pentingnya IMB dan IPB Sebuah Bangunan*, diunduh pada tanggal 25 Februari 2015.

<sup>11</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *op.cit*, hlm. 243

**C. Dampak penerbitan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel terhadap permohonan izin pembangunan hotel di Kota Yogyakarta**

Penerbitan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pengendalian Pembangunan Hotel menimbulkan dampak terhadap permohonan izin pembangunan hotel di Kota Yogyakarta. Dampak yang ditimbulkan adalah meningkatnya pengajuan permohonan IMB Bangunan Hotel yang masuk pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sebelum masa moratorium pembangunan hotel diberlakukan yakni pada 1 Januari 2014. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pengendalian Pembangunan Hotel, diatur bahwa Permohonan IMB Bangunan Hotel yang masuk pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sebelum 1 Januari 2014, permohonannya tetap diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, tercatat terdapat 104 permohonan IMB Bangunan Hotel yang masuk setelah Peraturan Walikota Yogyakarta tersebut diterbitkan hingga 31 Desember 2013. Dari 104 permohonan IMB Bangunan Hotel tersebut, 76 diantaranya telah diterbitkan sampai dengan per 10 November 2014, dan 28 lainnya izinnnya masih dalam pemrosesan. Dihubungkan dengan tujuan dari Peraturan Walikota Yogyakarta tersebut yakni untuk mengendalikan jumlah pembangunan hotel, justru menjadi stimulus bagi para investor untuk lebih cepat mengajukan permohonan IMB bangunan hotel di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sebelum masa moratorium pembangunan hotel, yaitu mulai 1 Januari 2014. Dengan meningkatnya jumlah permohonan IMB bangunan hotel menjelang masa moratorium membuktikan bahwa penerbitan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan hotel belum serta merta dapat mengendalikan jumlah pembangunan hotel di Kota Yogyakarta. Kawasan Kota Yogyakarta yang sudah begitu padat dengan bangunan, termasuk bangunan hotel lambat laun akan menimbulkan ketidaknyamanan baik bagi masyarakat asli Yogyakarta maupun wisatawan yang datang berkunjung. Penerbitan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel menjadi angin segar bagi masyarakat yang merindukan kondisi kota dimana pembangunan belum sepadat saat ini. Mencermati tujuan utama dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 tahun

2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel adalah ditujukan untuk mengendalikan pembangunan hotel, namun demikian peraturan tersebut dirasa kurang efektif. Pemrosesan permohonan IMB bangunan hotel yang masuk sebelum 1 Januari 2014 menjadi salah satu bukti ketidakefektifan tersebut. Selain itu belum ada kejelasan mengenai seperti apa penataan kawasan Kota Yogyakarta khususnya mengenai lokasi persebaran hotel setelah moratorium berakhir.

## **VII. Kesimpulan dan Saran**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rangkaian pembahasan dan analisis, maka dapat ditarik simpulan:

1. Maksud dan tujuan penerbitan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel adalah untuk mengendalikan pembangunan hotel di Kota Yogyakarta, dan untuk melindungi usaha-usaha perhotelan yang telah ada di Kota Yogyakarta. Selain itu peraturan walikota tersebut juga digunakan sebagai bahan kajian untuk menetapkan jumlah kebutuhan hotel di Kota Yogyakarta.
2. Dampak penerbitan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel terhadap permohonan izin pembangunan hotel di Kota Yogyakarta adalah pengajuan permohonan IMB Bangunan Hotel yang masuk pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta meningkat justru meningkat sebelum masa moratorium pembangunan hotel diberlakukan, yakni 1 Januari 2014, sehingga penerbitan peraturan walikota Yogyakarta tersebut tidak serta merta dapat menurunkan jumlah permohonan IMB Bangunan Hotel secara signifikan hingga 0%.

### **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka disarankan bahwa:

1. Bappeda Kota Yogyakarta, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dan instansi lain yang berkaitan dengan masalah pembangunan, perizinan maupun penataan kota sebaiknya saling bekerjasama dalam sebuah pembuatan regulasi atau peraturan. Ke depannya dalam pembuatan regulasi atau peraturan, antar

instansi-instansi tersebut harus saling berkomunikasi dengan baik sehingga tercipta peraturan yang dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuannya.

2. Pembuatan sebuah peraturan atau regulasi untuk ke depannya hendaknya memperhatikan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, dengan demikian peraturan atau regulasi yang dibuat selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

## **VIII. Daftar Pustaka**

### **Buku:**

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta.

### **Kamus:**

Pusat Bahasa Sepdikbud, 2001, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

### **Website:**

[www.atmajayanews.wordpress.com](http://www.atmajayanews.wordpress.com), Haryorachmanto Wijowarastro, Yogyakarta Berhati Nyaman?, diunduh pada tanggal 29 Agustus 2014.

[www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), Bilal Ramadhan, Pemkot Yogyakarta Masih “Bandel” Soal Izin Pendirian Hotel, diunduh pada tanggal 29 Agustus 2014.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel

